

Research Article

Government and Community Efforts to Address the Problems of Intolerance, Radicalism and Terrorism in Indonesia

Nathearia

Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: nathearia01@gmail.com

Didik Himmawan

Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: didikhimmawan@gmail.com

Amelia Putri Syariah

Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: ameliaputrisyariah@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam

Received : February 25, 2025
Accepted : April 7, 2025

Revised : March 26, 2024
Available online : April 25, 2025

How to Cite: Nathearia, Didik Himmawan, & Amelia Putri Syariah. (2025). Government and Community Efforts to Address the Problems of Intolerance, Radicalism and Terrorism in Indonesia. Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam, 1(3), 90-103.
<https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v1i3.12>

Abstract

The purpose of this study is to identify the strategies implemented by the Indonesian government and the role of society in preventing and addressing issues of intolerance, radicalism, and terrorism. The research method used in this article is a descriptive-analytical approach with a literature study, involving data collection from policy documents, scientific articles, books, and reports relevant to the discussed issues. The findings of this study indicate that the Indonesian government has undertaken various efforts to combat intolerance, radicalism, and terrorism through security policies, education, and deradicalization programs. Some of the measures include strengthening regulations, enhancing the capacity of security forces, and collaborating with international organizations. Additionally, society has actively contributed to preventing radicalism through multicultural education, interfaith dialogue, and social activities that strengthen relationships among citizens. Despite these efforts, significant challenges remain, such as the presence of groups exposed to radicalization and a lack of understanding of tolerance in certain segments of society. Therefore, further collaboration between the government and society is essential to create a more inclusive and peaceful Indonesia.

Keywords: Intolerance, Radicalism, Terrorism, Society, Government.

Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Problematika Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan peran masyarakat dalam mencegah serta menghadapi masalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Metode penelitian dalam artikel ini adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen kebijakan, artikel ilmiah, buku, serta laporan yang relevan dengan isu yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme melalui kebijakan-kebijakan keamanan, pendidikan, serta program deradikalisasi. Beberapa langkah yang diambil antara lain penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat keamanan, serta kolaborasi dengan lembaga internasional. Selain itu, masyarakat juga turut berperan aktif dalam pencegahan radikalisasi melalui pendidikan multikultural, dialog antaragama, dan kegiatan sosial yang mempererat hubungan antarwarga. Meskipun sudah ada berbagai upaya, tantangan besar tetap ada, seperti masih adanya kelompok-kelompok yang terpapar radikalisasi dan kurangnya pemahaman tentang toleransi dalam beberapa lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan Indonesia yang lebih inklusif dan damai.

Kata Kunci: Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, Masyarakat, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur menekankan bahwa toleransi merupakan fondasi utama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Ia berpendapat bahwa toleransi tidak hanya berarti menghormati atau tenggang rasa, tetapi juga melibatkan pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan diteruskan dengan saling memiliki (*sense of belonging*) dalam kehidupan, yang disebutnya sebagai "*ukhuwah basyariyah*" atau persaudaraan kemanusiaan. (Sajid, 2021) Gus Dur juga menekankan pentingnya pengakuan yang tulus akan perbedaan keyakinan orang lain sebagai dasar kerukunan umat beragama. (Abd. Muin, 2021).

Abdurrahman Wahid, sebagai tokoh pluralisme di Indonesia, pemikiran Gus Dur tentang toleransi dan kerukunan antarumat beragama sangat penting dalam memahami peran masyarakat dalam menghadapi intoleransi. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan landasan teori dan wawasan lebih dalam tentang konteks sosial dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, peneliti akan mempelajari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan fenomena intoleransi, radikalisasi, dan terorisme serta respons pemerintah dan masyarakat terhadap masalah tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan suku, agama, ras, dan budaya, menghadapi tantangan besar untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan sering kali justru menjadi sumber konflik akibat intoleransi, radikalisme, dan

terorisme. Ketiga permasalahan ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional, tetapi juga merusak nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

Intoleransi, sebagai bentuk ketidakmampuan menerima perbedaan, dapat memicu diskriminasi, ujaran kebencian, dan konflik sosial. Hal ini sering kali bermula dari pemahaman agama atau budaya yang sempit. Radikalisme muncul sebagai wujud ekstremisme yang berusaha memaksakan keyakinan tertentu melalui cara-cara yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terorisme, yang merupakan bentuk kekerasan paling ekstrem, berupaya menciptakan ketakutan di masyarakat, menghancurkan fasilitas umum, serta mengancam integritas Negara. K.H. Syafii Maarif menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme tidak hanya mencederai ajaran agama, tetapi juga melukai nilai-nilai luhur kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan pandangannya bahwa radikalisme agama dalam tingkatan yang sangat akut dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekstrem seperti bom bunuh diri dengan dalih jihad, yang pada akhirnya merusak citra agama itu sendiri. (Syamsul, 2021)

Al-Qur'an memberikan panduan moral untuk menciptakan kehidupan yang damai. Sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."

Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman adalah sunnatullah, dan manusia diperintahkan untuk menjaga persatuan dalam perbedaan.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan persaudaraan dalam sebuah sabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَىٰ هَاهُنَا -وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- بِحَسَبِ

أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمِ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya (dalam kesulitan). Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya; dan barang siapa menghilangkan kesulitan seorang Muslim, Allah akan menghilangkan kesulitannya pada Hari Kiamat; dan barang siapa menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya pada Hari Kiamat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menegaskan pentingnya hubungan persaudaraan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Menghilangkan kebencian, memupuk toleransi, dan saling mendukung adalah wujud nyata dari ajaran Islam yang damai. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Program deradikalisasi melibatkan tokoh agama, pendekatan budaya untuk memperkuat moderasi beragama, serta penegakan hukum terhadap pelaku terorisme adalah langkah-langkah strategis yang telah diterapkan. Namun, seperti yang diungkapkan Dr. Zakky Mubarak (2022), langkah-langkah ini memerlukan dukungan penuh dari masyarakat agar dapat berjalan efektif.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan budaya toleransi, mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas sosial. Memberikan edukasi yang tepat tentang bahaya intoleransi dan radikalisme, serta menguatkan pemahaman agama yang rahmatan lil 'alamin, menjadi langkah strategis yang harus terus dikembangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang upaya pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi strategis guna menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan bersatu di tengah keberagaman. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan ini dapat diminimalisasi sehingga Indonesia dapat menjadi contoh dunia dalam mengelola keberagaman dengan damai.

Pembahasan ini menarik karena mengangkat isu yang relevan dan krusial, yaitu merebaknya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam persatuan dan stabilitas nasional tetapi juga merusak harmoni sosial serta nilai-nilai Pancasila

sebagai dasar negara. Artikel ini memberikan analisis mendalam dengan mengupas akar permasalahan, seperti pemahaman agama dan budaya yang sempit hingga ekstremisme yang mengarah pada kekerasan. Selain itu, solusi yang ditawarkan bersifat komprehensif dengan menyoroti sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah berperan melalui program deradikalisasi, pendekatan budaya untuk memperkuat moderasi beragama, serta penegakan hukum terhadap pelaku terorisme. Di sisi lain, masyarakat diharapkan aktif dalam menanamkan nilai-nilai toleransi di tingkat keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan. Pendekatan berbasis nilai-nilai agama, seperti toleransi, persaudaraan, dan prinsip rahmatan lil 'alamin, juga menjadi strategi penting untuk menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman. Dengan pandangan optimis yang ditawarkan, pembahasan ini memberikan harapan bahwa melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat menjadi negara yang damai, aman, dan bersatu di tengah tantangan global.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi problematika intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Indonesia, yang membutuhkan kajian literatur yang mendalam.

Studi kepustakaan atau *library research* merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen pemerintah, serta literatur ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. () Penelitian ini menekankan pada pengumpulan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur yang membahas kebijakan pemerintah, peran masyarakat, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang melibatkan kajian terhadap berbagai literatur yang relevan. Beberapa sumber yang akan digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1. Dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan intoleransi, radikalisasi, dan terorisme, termasuk undang-undang,

peraturan, dan instruksi yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait.

2. Laporan penelitian dan artikel ilmiah dari berbagai sumber yang membahas strategi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ekstremisme dan terorisme.
3. Buku dan jurnal akademik yang membahas teori-teori sosial, politik, serta budaya yang relevan dengan isu intoleransi, radikalisasi, dan terorisme.
4. Studi kasus yang diambil dari laporan-laporan yang memaparkan implementasi kebijakan dan program pencegahan radikalisasi dan terorisme di Indonesia.

c. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai literatur secara mendalam dan mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti:

1. Upaya pemerintah dalam menangani intoleransi, radikalisasi, dan terorisme, termasuk kebijakan yang diterapkan dan hasil yang dicapai.
2. Peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah dan inisiatif lokal untuk pencegahan radikalisasi.
3. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini.
4. Relevansi kebijakan internasional dan local context dalam mengatasi ekstremisme dan terorisme di Indonesia.

Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi yang efektif dalam mengatasi masalah intoleransi, radikalisasi, dan terorisme di Indonesia serta kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat. (John W. Creswell, Esterberg)

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Intoleransi

Intoleransi merujuk pada ketidakmauan atau ketidakmampuan untuk menerima pandangan, kepercayaan, atau perilaku yang berbeda dari milik sendiri. Sikap ini dapat menyebabkan diskriminasi dan konflik dalam masyarakat. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, intoleransi adalah "ketidaksediaan menghargai perbedaan dalam masyarakat yang majemuk."

Intoleransi sering kali muncul dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi terhadap kelompok agama, suku, ras, atau gender

tertentu. Hal ini dapat memperburuk hubungan antarkelompok di masyarakat dan menciptakan polarisasi sosial. Sebagai contoh, intoleransi agama dapat menyebabkan sikap eksklusif di antara kelompok keagamaan, yang berdampak pada perpecahan komunitas. Dalam konteks ini, Azyumardi Azra (2017) dalam bukunya *Identitas dan Krisis Pluralisme* menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai pluralisme untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keragaman.

Lebih lanjut, intoleransi juga menghambat terciptanya dialog yang sehat dalam masyarakat. Ketika individu atau kelompok tidak bersedia mendengar pendapat yang berbeda, potensi untuk menemukan solusi atas permasalahan bersama menjadi lebih kecil. Liliweri (2005) dalam *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya* menunjukkan bahwa prasangka dan stereotip terhadap kelompok lain sering kali menjadi akar dari intoleransi. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi salah satu upaya strategis untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan sejak usia dini.

b. Radikalisme

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan cara-cara ekstrem. Penganut radikalisme sering kali menolak kompromi dan cenderung menggunakan metode kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), radikalisme adalah "paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis."

Radikalisme dapat berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari ideologi politik hingga keagamaan. Biasanya, radikalisme muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau politik yang dianggap tidak adil. Menurut Suprpto (2018) dalam *Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis*, paham ini sering kali memanfaatkan narasi ketidakadilan dan ketidakpuasan untuk merekrut pengikut baru, khususnya di kalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrem.

Selain itu, radikalisme berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan integrasi nasional. Ketika kelompok radikal berusaha memaksakan ideologi mereka dengan cara-cara kekerasan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, Asrori (2015) dalam jurnal *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* menekankan pentingnya peran keluarga,

pendidikan, dan media dalam mencegah penyebaran ideologi radikal. Salah satu langkah preventif yang efektif adalah memperkuat pendidikan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi guna menangkal paham-paham ekstrem.

c. Terorisme

Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, dengan tujuan mencapai tujuan politik, ideologis, atau religius tertentu. Tindakan terorisme sering kali menargetkan masyarakat sipil dan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau opini publik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah "perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas."

Terorisme memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap korban secara langsung tetapi juga terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Tindakan terorisme sering kali menyebabkan kerugian besar, baik dalam bentuk kehilangan nyawa, trauma psikologis, maupun kerusakan infrastruktur. Menurut Hoffman (2006) dalam bukunya *Inside Terrorism*, terorisme adalah strategi yang sengaja dirancang untuk menciptakan ketakutan dan ketidakamanan di masyarakat dengan tujuan memaksakan perubahan yang diinginkan oleh pelaku.

Selain itu, terorisme sering kali memanfaatkan jaringan global untuk melancarkan aksinya, menjadikannya ancaman yang sulit dikendalikan oleh satu negara saja. Dalam konteks Indonesia, Noorhaidi Hasan (2012) dalam *Islamic Radicalism and Terrorism in Indonesia* menyoroti bahwa kelompok teroris lokal sering kali mendapatkan dukungan ideologi dan logistik dari jaringan internasional. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara melalui forum internasional seperti PBB atau ASEAN menjadi langkah penting dalam memerangi terorisme. Upaya ini perlu diimbangi dengan pendekatan soft power seperti pendidikan, deradikalisasi, dan penguatan ekonomi masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan terorisme.

d. Problematika Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan ancaman serius bagi Indonesia, karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan konsensus dasar negara. Fenomena ini tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga bagian dari masalah global akibat dinamika geopolitik. Intoleransi merupakan sikap tidak menghargai perbedaan,

yang dapat memicu diskriminasi dan konflik sosial. Sikap ini mengingkari kebinekaan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta norma agama yang beradab. Radikalisme adalah paham yang mendorong perubahan drastis terhadap sistem sosial atau politik dengan cara-cara ekstrem, termasuk kekerasan. Paham ini sering kali berakar dari interpretasi sempit ajaran agama dan dapat berkembang menjadi tindakan terorisme. Terorisme merupakan tindakan kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan luas dan mencapai tujuan tertentu, seringkali bermotif ideologis atau politis. Di Indonesia, aksi terorisme telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang signifikan, serta merusak citra negara di mata internasional. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah dan menanggulangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Pendekatan yang digunakan mencakup keseimbangan antara tindakan tegas (*hard approach*) dan pendekatan lunak (*soft approach*). Pendekatan lunak meliputi kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, serta pemantauan kelompok dan akun radikal.

Selain itu, upaya pencegahan juga difokuskan pada lingkungan pendidikan, mengingat paham radikalisme dan intoleransi dapat menyusup ke kalangan pelajar dan mahasiswa. Sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya paham-paham tersebut dilakukan untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan maraknya penyebaran paham radikal melalui media sosial dan internet. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mencegah penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara.

e. Kasus Intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia

Salah satu kasus intoleransi di Indonesia yang cukup mencolok adalah pelarangan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor. Meskipun gereja tersebut sudah memiliki izin resmi, sebagian warga menolak keberadaannya hingga pembangunan dihentikan. Jemaat pun terpaksa beribadah di luar gedung selama bertahun-tahun. Kasus lainnya adalah diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah yang sering mengalami persekusi, seperti pengusiran dari tempat tinggal mereka. Kasus-kasus ini menunjukkan masih adanya pola pikir intoleran yang berlawanan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Kasus intoleransi ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang keberagaman, pengaruh kelompok tertentu yang menyebarkan kebencian, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku

intoleransi. Akibatnya, masyarakat menjadi terpecah, rasa saling percaya berkurang, dan nilai-nilai Pancasila terganggu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah konkret seperti memperkuat pendidikan tentang pentingnya toleransi, mengedukasi masyarakat mengenai keberagaman, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa keberpihakan pada kelompok mayoritas. Upaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan saling menghormati.

f. Kasus Radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia

Radikalisme di Indonesia telah menimbulkan berbagai peristiwa kekerasan yang mengancam stabilitas nasional. Contohnya, pada 28 Maret 2021, terjadi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang menewaskan dua orang dan melukai 20 lainnya. Serangan ini diklaim oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang memiliki afiliasi dengan ISIS. Selain itu, pada 14 September 2023, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengungkapkan temuan adanya indikasi radikalisme di sejumlah sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Tengah. Hasil pemantauannya menunjukkan bahwa tujuh kepala sekolah diduga terlibat dalam jaringan radikalisme. Peristiwa ini menyoroti pentingnya pengawasan dan pencegahan radikalisasi di lingkungan pendidikan untuk menjaga integritas dan keamanan masyarakat.

g. Kasus Terorisme yang pernah terjadi di Indonesia

Indonesia telah mengalami sejumlah serangan terorisme besar, dimulai dari Bom Bali I pada 2002 yang menewaskan 202 orang, hingga serangan lainnya seperti bom JW Marriott pada 2003 dan Bom Bali II pada 2005. Kasus-kasus ini umumnya dikaitkan dengan kelompok militan seperti Jamaah Islamiyah yang terinspirasi oleh ideologi ekstremis global. Pemerintah Indonesia merespons dengan mendirikan Detasemen Khusus 88 (Densus 88), yang berhasil menangkap banyak pelaku terorisme. Meski demikian, jaringan teroris terus berkembang, dan terorisme tetap menjadi ancaman yang signifikan bagi stabilitas nasional.

Upaya Indonesia dalam menangani terorisme tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan deradikalisasi untuk mengurangi pengaruh ideologi ekstremis. Program deradikalisasi bertujuan untuk mengubah pandangan para eks-narapidana terorisme dan membantu mereka kembali ke masyarakat. Namun, efektivitas program ini masih dipertanyakan, karena beberapa mantan teroris kembali terlibat dalam aksi terorisme. Secara keseluruhan, meski Indonesia telah membuat kemajuan dalam memerangi terorisme, tantangan besar tetap ada, dan upaya

komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional tetap diperlukan.

h. Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Problematika Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Berikut adalah upaya-upaya tersebut:

1. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran paham radikal. BNPT menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa dalam mencegah intoleransi dan radikalisme.
2. BNPT menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, seperti Yayasan Dewa Dewi Indonesia, untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi anti intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kerja sama ini bertujuan untuk menyebarkan lima vaksin pencegahan, yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, moderasi beragama, akar budaya bangsa, dan pembangunan kesejahteraan.
3. Pemerintah mendorong pendekatan pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha, untuk mencegah intoleransi dan radikalisme. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam upaya penanggulangan terorisme.
4. Pemerintah melaksanakan program deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan individu yang terpapar paham radikal. Program ini mencakup penyuluhan, konseling, dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu reintegrasi mereka ke masyarakat.
5. Pemerintah menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pemahaman dan penghayatan Pancasila diharapkan dapat menjadi benteng dalam menghadapi paham radikal.
6. Pemerintah melalui aparat penegak hukum secara tegas menindak pelaku terorisme dan radikalisasi. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran paham radikal.

Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan bebas dari paham radikal.

i. Upaya Masyarakat dalam Menghadapi Problematika Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme melibatkan berbagai strategi yang berfokus pada pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan komunitas.

1. Peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda menjadi prioritas. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar, menekankan pentingnya generasi muda untuk melek literasi digital guna mencegah penyebaran paham radikal melalui media sosial.
2. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program seperti Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, dan Desa Siapsiaga. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan sektor swasta (pentahelix) dianggap krusial dalam mencegah intoleransi dan radikalisme.
3. Institusi pendidikan berperan penting dalam mencegah penyebaran paham radikal. Seminar dan diskusi di lingkungan kampus, seperti yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Riau, bertujuan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bahaya intoleransi dan radikalisme.
4. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan dalam menangkal paham radikal. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menyelesaikan intoleransi antarumat beragama melalui sosialisasi dan pemahaman bersama.

Melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi, pemberdayaan komunitas, sinergi antar pemangku kepentingan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia berupaya efektif dalam menghadapi tantangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

KESIMPULAN

Indonesia menghadapi tantangan besar berupa intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang mengancam stabilitas nasional, harmoni sosial, serta nilai-nilai dasar Pancasila. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menangani isu ini melalui pendekatan keamanan, pendidikan, dan program deradikalisasi. Beberapa upaya yang dilakukan termasuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat keamanan, serta menjalin kerja sama dengan lembaga internasional.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan radikalisasi melalui pendidikan multikultural, dialog antaragama, dan kegiatan sosial. Langkah-langkah ini berkontribusi dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Namun demikian,

masih terdapat berbagai tantangan, seperti kelompok yang terpapar paham radikal dan kurangnya pemahaman akan toleransi di beberapa lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai. Pendidikan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan harus terus ditanamkan sejak dini untuk mencegah penyebaran paham radikal. Selain itu, pengawasan terhadap penyebaran informasi di media, termasuk media sosial, perlu ditingkatkan untuk mencegah propaganda radikal dan intoleran. Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta melindungi nilai-nilai luhur Pancasila di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Sajid Iqbal Firdaus (2021). *Pemikiran Toleransi KH. Abdurrahman Wahid (gus dur) dan relevansinya dalam keberagaman di Indonesia*. Skripsi UIN Surabaya
http://digilib.uinsa.ac.id/47901/2/Sajid%20Iqbal%20Firdaus_E72214022.pdf diunduh tanggal 2 Desember 2024
- Abd Muin (2021). *Persaudaraan Universal Perspektif KH Abdurrahman Wahid dan Implikasi Terhadap Keberagaman di Indonesia*, 4(1), 79-114. [E-Jurnal](#) diunduh tanggal 2 Desember 2024
- Syamsul Arif Galib (2021). Titik Temu Radikalisme dan Terorisme, 13(1), 1-16. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur> diunduh tanggal 2 Desember 2024
- RMOL Publika. (2021). *Intoleransi, radikalisme, dan terorisme: Ancaman terhadap ideologi Pancasila dan konsensus dasar negara*. Diakses dari <https://rmol.id/publika/read/2021/12/28/517130/intoleransi-radikalisme-dan-terorisme> pada 2 Desember 2024.
- Kompas Nasional. (2021). *Radikalisme di Indonesia dan dampaknya terhadap stabilitas nasional*. Kompas Nasional, 12(3), 145-162. <https://kompasnasional.com/radikalisme/di-indonesia-29-maret-2021> diakses pada 2 Desember 2024.
- Jateng Provinsi. (2023). *Indikasi radikalisme di sekolah-sekolah Jawa Tengah*. Jateng Provinsi, 18(7), 112-118. <https://jatengprovinsi.com/radikalisme/sekolah-jawa-tengah> diakses pada 2 Desember 2024.
- Manbpn. (tanpa tahun). Radikalisme adalah paham yang mendorong perubahan drastis terhadap sistem sosial atau politik dengan cara-

cara ekstrem, termasuk kekerasan. *Sumber tidak disebutkan.* Diakses dari <https://manbpn.com> pada tanggal 2 Desember 2024

University of Tanjungpura. (tanpa tahun). Terorisme merupakan tindakan kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan luas dan mencapai tujuan tertentu, seringkali bermotif ideologis atau politis. *Sumber tidak disebutkan.* Diakses dari <https://untan.ac.id> pada tanggal 2 Desember 2024

Wikipedia. (tanpa tahun). Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah dan menanggulangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. *Wikipedia.* Diakses dari <https://id.wikipedia.org> pada tanggal 2 Desember 2024

Lemhannas. (tanpa tahun). Pendekatan lunak meliputi kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, serta pemantauan kelompok dan akun radikal. *Lemhannas RI.* Diakses dari <https://lemhannas.go.id> pada tanggal 2 Desember 2024